5 INFRASTRUCTURE & TRANSPORTATIONS
INVESTOR DAILY

1 Juli, RI Terapkan Pemisahan Alur Selat Sunda dan Lombok

Oleh **Thresa Sandra Desfika**

▶ JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan Indonesia siap mengimplementasikan bagan pemisahan alur laut atau *traffic separation scheme* /TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli mendatang.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub telah melakukan sejumlah persiapan menuju pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, mulai dari aspek kenavigasian serta penegakan hukum.

"Artinya Indonesia siap mengimplementasikan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Agus Purnomo dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (19/6).

Agus menuturkan, Indonesia bersama Malaysia dan Singapura memiliki TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura. Namun demikian, TSS di Selat Malaka dan Selat Singapura tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara, sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya.

"Hal itu yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO (International Maritime Organization) dan berada di dalam ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) I dan ALKI II," papar Agus.

Data menyebutkan sebanyak 53.068 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Sunda setiap tahunnya serta sebanyak 36.773 unit kapal melewati Selat Lombok setiap tahunnya. Selat Sunda adalah salah satu selat yang paling penting di Indonesia yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI I dari selatan ke utara dengan jalur lintas yang memiliki kepadatan tinggi dari Pulau Jawa ke Sumatera yang sebagian besar dilalui oleh kapal penumpang.

Adapun Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II juga merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi dikarenakan oleh keberadaan kawasan wisata di sekitarnya.

Dalam waktu dekat, lanjut Agus, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut akan menggelar latihan patroli penegakan hukum di bidang keselamatan berlalu lintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok. Salah satu kegiatan yang akan dilakukan, yaitu kegiatan *table top exercise*. Kegiatan ini dilaksanakan untuk merancang komunikasi dan pergerakan kapal negara dan latihan patroli penegakan hukum di bidang keselamatan berlalu lintas dengan kapal patroli KPLP yang rencananya dilaksanakan di Selat Sunda pada 23 Juni 2020 dan apel kesiapan/latihan basah pada 27 Juni 2020.

Menurut Agus, kegiatan ini bertujuan untuk memberi pembekalan bagi personel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terutama ABK kapal negara patroli dan petugas VTS agar memahami mekanisme proses perencanaan operasi patroli dan penegakan hukum di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok serta koordinasi yang sistematis dan terpadu baik internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun antar-instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

"KPLP juga menyiapkan sistem operasional prosedur (SOP) patroli dan penegakan hukum di bidang keselamatan berlalu lintas di TSS Selat Sunda dan Selat Lombok dengan menurunkan kapal patroli KPLP beserta personelnya," ucap Agus.

Selain dari hal penegakan hukum, Ditjen Perhubungan Laut juga melakukan persiapan dari aspek kenavigasian, seperti kesiapan sarana dan prasarana *vessel traffic service* (VTS), sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) VTS, serta penyiapan *navigation guideline*.

Direktorat Kenavigasian juga melakukan sosialisasi implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, serta penyebaran informasi baik melalui *AIS broadcast* dan *SMS blast* yang bekerja sama dengan Kemenkominfo.

Tiga Pertimbangan AP II Tak Operasikan Semua Terminal Soetta

JAKARTA - Di tengah pandemi Covid-19, Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) melayani seluruh penerbangan di Terminal 2D dan 2E serta Terminal 3, kemudian untuk sementara waktu tidak mengoperasikan Terminal 1 dan 2F. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin mengatakan, keputusan ini didasari tiga pertimbangan, yakni penyesuaian pola operasional, efektifitas operasional, dan percepatan program revitalisasi gedung terminal.

"Saat ini keseluruhan kapasitas terminal di Bandara Soekarno-Hatta (Terminal 1, 2, dan 3) dapat menampung hingga sekitar 45 juta penumpang per tahun. Kemudian, kami melakukan penyesuaian pola operasional agar Soekarno-Hatta dapat beroperasi secara efektif. Penyesuaian pola operasional dilakukan dengan menutup Terminal 1 dan Terminal 2F," ujar Awaluddin dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (18/6).

Selanjutnya, penutupan Terminal 1 dan Terminal 2F didasari pertimbangan kedua, yakni efektifitas operasional. Seluruh penerbangan kini dioperasikan Terminal 2D dan 2E serta Terminal 3.

"Dengan demikian, Bandara Soekarno-Hatta saat ini beroperasi secara efektif dan efisien, tetap siaga 24 jam," jelas dia.

Kemudian, pertimbangan ketiga, penutupan Terminal 1 dan 2F dilakukan dalam rangka percepatan program revitalisasi gedung terminal yang saat ini berlangsung di Terminal 1C dan Terminal 2F. (**esa**)

JAPFA

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan/
Domiciled in South Jakarta

Unofficial Translation

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

Direksi PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") (**"RUPS")** pada:

Hari/tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
Waktu : Pukul 10.32 s/d 11.25 WIB - RUPST
Pukul 11.32 s/d 11.57 WIB - RUPSLB
Tempat : HARRIS Hotel, Unique Room
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960

RUPS tersebut dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
- Komisaris Independen : Ibu Retno Astuti Wibisono
- Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Herry Wibowo
- Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
- Wakil Direktur Utama : Bpk. Bambang Budi Hendarto
- Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
- Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS berjumlah 9.074.946.206 saham atau mewakili 77,47% dari 11.714.114.001 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).

RUPS dimulai dengan RUPST, dengan agenda yaitu:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2019.
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku 2019.
3. Pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
5. Penetapan gaji/tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Untuk acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, hanya terdapat 1 orang pemegang saham yang mengajukan pendapat.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPST tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 18 Juni 2020 No.92, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Sebanyak 7.166.300 suara Abstain, sebanyak 11.500 suara Tidak Setuju, sehingga total suara Setuju 9.074.934.706 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST adalah:

(i)Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang di dalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (yang telah diaudit) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (*a member firm of Ernst & Young Global Limited*), sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen, tertanggal 28 Februari 2020 Nomor 00141/2.1032/AU.1/01/1174-1/1/II/2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material; (ii) mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Tahunan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; dan (iii) memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya ("*acquit et décharge*") kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

Mata Acara Kedua:

Sebanyak 11.300 suara Abstain, sebanyak 11.500 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.074.934.706 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST adalah:

a. Menyetujui penggunaan laba konsolidasi Perseroan tahun buku 2019 sebesar Rp1.765.177.643.795,- (satu triliun tujuh ratus enam puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah), digunakan sebagai berikut:
   i. sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), disisihkan sebagai dana cadangan Perseroan;
   ii. sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah) per saham, dibagikan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sebagai dividen tunai;
   iii. sisanya dicatat sebagai saldo laba Perseroan;
b. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

Mata Acara Ketiga:

Sebanyak 6.543.400 suara Abstain, sebanyak 289.683.500 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 8.785.262.706 suara atau merupakan 96,81% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST adalah:

Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik, guna memeriksa pembukuan Perseroan tahun buku 2020, serta menetapkan honorarium Akuntan Publik dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat:

Sebanyak 6.544.300 suara Abstain, sebanyak 1.082.691.408 suara Tidak Setuju, sehingga suara total setuju 7.992.254.798 suara atau merupakan 88,07% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST adalah:

a. Mengangkat anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan yang berlaku efektif sejak penutupan RUPST ini, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2021, dengan susunan sebagai berikut:
   - Komisaris Utama : Bpk. H. Syamsir Siregar
   - Wakil Komisaris Utama : Bpk. Hendrick Kolonas
   - Komisaris Independen : Ibu Retno Astuti Wibisono
   - Komisaris Independen : Bpk. Ignatius Herry Wibowo
   - Komisaris Independen : Bpk. Ito Sumardi Djuni Sanyoto
   - Direktur Utama : Bpk. Handojo Santosa
   - Wakil Direktur Utama : Bpk. Bambang Budi Hendarto
   - Direktur : Bpk. Tan Yong Nang
   - Direktur : Bpk. Leo Handoko Laksono
   - Direktur : Bpk. Rachmat Indrajaya
b. Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan pengangkatan anggota Dewan Komisaris (termasuk Komisaris Independen) dan Direksi Perseroan tersebut, dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta melakukan semua tindakan yang disyaratkan, sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Kelima:

Sebanyak 12.600 suara Abstain, sebanyak 3.694.087 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.071.252.119 suara atau merupakan 99,96% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST, sehingga Keputusan RUPST adalah:

Memberikan wewenang kepada (a) Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan bagi anggota Direksi berikut pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, dan (b) Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen) dan membagi tugas dan wewenang masing-masing anggota Dewan Komisaris (termasuk anggota Komisaris Independen).

RUPS dilanjutkan dengan RUPSLB.

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat, Pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPSLB berjumlah 9.075.426.521 saham atau mewakili 77,47% dari 11.714.114.001 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan), dengan Agenda, yaitu:

a. Persetujuan atas Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 dan POJK No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.
b. Persetujuan atas pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan penggunaanya.

Untuk acara RUPSLB tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan.

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam RUPSLB dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Bahwa dalam RUPSLB tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk tertanggal 18 Juni 2020 No. 93, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Sebanyak 2.500 suara Abstain, sebanyak 240.000 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.075.186.521 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, sehingga Keputusan RUPSLB adalah:

Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan mengeluarkan saham baru Seri A dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini atau 3.517.972.560 (tiga milyar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh) saham Seri A ("Saham Baru") dengan nilai nominal per saham sebesar Rp200,- sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:

a. Menyetujui dan merubah ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas, untuk:
   i. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengeluaran saham baru dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
   ii. menetapkan jumlah saham yang dikeluarkan, dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu selesai;
   iii. melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, tanpa ada suatu tindakan pun yang dikecualikan, kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
   iv. menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Kedua:

Sebanyak 2.500 suara Abstain, sebanyak 36.900 suara Tidak Setuju, sehingga total suara setuju 9.075.389.621 suara atau merupakan 99,99% atau lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB, sehingga Keputusan RUPSLB adalah:

a. Menyetujui rencana pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, dengan jumlah maksimum sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang diumumkan melalui situs PT Bursa Efek Indonesia dan situs Perseroan, pada tanggal 5 Mei 2020.
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas untuk menggunakan saham yang dibeli kembali tersebut untuk tujuan berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
   i. penjualan kembali atau dijual diluar pasar kepada investor dan/atau pemegang saham Perseroan;
   ii. pembiayaan hutang yang bersifat ekuitas seperti obligasi yang dapat ditukarkan (*convertible bond)*;
   iii. pemberian saham kepada karyawan (ESOP) termasuk namun tidak terbatas pada *Japfa Performance Share Plan*;
   iv. pengurangan modal; atau
   v. keperluan lainnya sepanjang diijinkan oleh ketentuan yang berlaku.

Jadual Pembagian Dividen :

- Pengumuman di Lantai Bursa			: 19 Juni 2020
- Cum Dividen pada :	-	Pasar Reguler dan Negosiasi	: 26 Juni 2020
	-	Pasar Tunai	: 30 Juni 2020
- Ex Dividen pada :	-	Pasar Reguler dan Negosiasi	: 29 Juni 2020
	-	Pasar Tunai	: 1 Juli 2020
- Tanggal Pencatatan (*Recording Date*)			: 30 Juni 2020
- Tanggal Pembayaran			: 15 Juli 2020

Tata Cara Pembayaran Dividen :

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2. Dividen setelah dikurangi Pajak Penghasilan (PPh) sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, akan dibayarkan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), maka Dividen akan diterima melalui pemegang rekening di KSEI;
4. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat, maka Dividen akan dibayarkan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan: **PT ADIMITRA JASA KORPORA**, dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250, Telp. (021) 2974 5222, Fax: (021) 2928 9961 ("**BAE**"), untuk memberitahukan melalui surat dengan menyebutkan nama, alamat dan nomor rekening bank atas nama pemegang saham yang bersangkutan disertai copy KTP sesuai alamat dalam Daftar Pemegang Saham. Surat tersebut harus diterima oleh BAE paling lambat tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang belum memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP"), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan meminta permohonan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan tersebut, dimohon agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dinegaranya atau fotokopi yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia, apabila SKD tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, sebagai berikut :
   i. Bagi pemegang Saham yang masih memegang saham warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan kepada BAE;
   ii. Bagi pemegang saham tanpa warkat, maka asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir dikirimkan melalui pemegang rekening KSEI sesuai ketentuan KSEI;
   iii. Asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir tersebut, harus diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2020 pukul 16.00 WIB atau sesuai ketentuan KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan asli SKD atau fotokopi yang telah dilegalisir belum diterima, maka Dividen yang dibayarkan akan dikenakan pemotongan pajak sebesar 20%.

ANNOUNCEMENT OF
SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING AND EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDER'S MEETING OF
PT JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk.

*The Board of Directors of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, (hereinafter referred to as "**the Company**"), having its domiciled in South Jakarta, hereby announces that the Company has convened the Annual General Shareholders' Meeting ("the AGM") and the Extraordinary General Shareholders' Meeting ("the EGM") ("**the RUPS**"), on:*

Day/Date : Thursday, June 18, 2020
Time : 10.32 – 11.25 pm Western Indonesia Time (WIB) - AGM
11.32 – 11.57 pm Western Indonesia Time (WIB) - EGM
Place : HARRIS Hotel, Unique Room,
Jl. Dr. Saharjo No. 191, Jakarta 12960

RUPS was attended by the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company, as follows:

- *President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar*
- *Independent Commissioner : Mrs. Retno Astuti Wibisono*
- *Independent Commissioner : Mr. Ignatius Herry Wibowo*
- *Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto*
- *Vice President Director : Mr. Bambang Budi Hendarto*
- *Director : Mr. Leo Handoko Laksono*
- *Director : Mr. Rachmat Indrajaya*

With reference to the Company Shareholders' Register as of May 19, 2020 up to 4.00 pm, the Shareholders present and/or represented at RUPS the meeting with amount of 9.074.946.206 shares, representing 77,47% of 11.714.114.001 shares, which are the entire issued shares of the Company (after deducting with buy back shares).

RUPS was convened with AGM with the following agenda:

1. *To approve the Company's Annual Report and ratification to the Company's Financial Statement for the financial year 2019;*
2. *To determine the utilization of Company's profit for the financial year 2019;*
3. *To authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountants to audit the Company's book for the financial year 2020 and to determine its remuneration;*
4. *To appoint members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;*
5. *To determine salary/benefit of the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors;*

For AGM's Agendas, the Company has given opportunities to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question. There is only 1 shareholder who give his opinion.

The adoption of resolution AGM shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by way of voting.

The AGM has resolved the following resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No. 92 dated June 18, 2020, made before the Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., which is summarized as follows:

First Agenda:

Abstain votes: 7.166.300, "Against/Not agree" votes: 11.500, hence the number of Affirmative votes: 9.074.934.706 votes or 99,99%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

(i) Approve the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2019 which includes the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (audited) for financial year ended December 31, 2019 which has been audited by the Public Accountant Office of Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) as stipulated in the Independent Auditor's Report of February 28, 2020 Number 00141/2.1032/AU.1/01/1174-1/1/II/2020, with fair opinion, in all material respect; (ii) to ratify the Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended December 31, 2019; and (iii) to acquit and discharge the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision in the financial year ended December 31, 2019, provided that the management and supervision are reflected in the Company's Annual Report for the financial year ended December 31, 2019;

Second Agenda:

Abstain votes: 11.300, "Against/Not agree" votes: 11.500, hence the number of Affirmative votes: 9.074.934.706 or 99,99%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

a. Approve the use of consolidated profit of the Company for the financial year 2019 with amount of Rp1.765.177.643.795,- (one trillion, seven hundred sixty-five billion, one hundred seventy-seven million, six hundred forty-three thousand, seven hundred ninety-five Rupiah) as follows:
   i. Rp20.000.000.000,- (twenty billion Rupiah) as the Company's reserve fund;
   ii. Rp. 20,00 (twenty Rupiah) per share will be distributed to the Shareholders of the Company as the cash dividends;
   iii. the remaining amount shall be recorded as profit balance of the Company;
b. To grant power and authority to the Board of Directors of the Company to take all necessary actions, in connection with the distribution of cash dividends.

Third Agenda:

Abstain votes: 6.543.400, "Against/Not agree" votes: 289.683.500, hence the number of affirmative votes 8.785.262.706 votes or 96,81%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

Authorize and give power to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accountant Office to audit the Company's book for the financial year 2020 and to determine the remuneration of of the Public Accountant and other requirements for the said Public Accountant Office, and to determine the other Public Accountant Office, in the event the determined Public Accountant Office, for any reason, can not finish auditing the Company Financial Report for the financial year 2020, including to determine the remuneration of such Public Accountant Office.

Fourth Agenda:

Abstain votes: 6.544.300, "Against/Not agree" votes: 1.082.691.408, hence the number of affirmative votes 7.992.254.798 votes or 88,07%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

a. Appoint members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and the Board of Directors of the Company, commencing from the closing of this AGM, until the closing of the Annual General Meeting of the Shareholders of the Company year of 2021, with the following composition:
   - *President Commissioner : Mr. H. Syamsir Siregar*
   - *Vice President Commissioner : Mr. Hendrick Kolonas*
   - *Independent Commissioner : Mrs. Retno Astuti Wibisono*
   - *Independent Commissioner : Mr. Ignatius Herry Wibowo*
   - *Independent Commissioner : Mr. Ito Sumardi Djuni Sanyoto*
   - *President Director : Mr. Handojo Santosa*
   - *Vice President Director : Mr. Bambang Budi Hendarto*
   - *Director : Mr. Tan Yong Nang*
   - *Director : Mr. Leo Handoko Laksono*
   - *Director : Mr. Rachmat Indrajaya*
b. Authorize and give power with the rights of substitution to the Board of Directors of the Company to incorporate such appointment of the members of the Board of Commissioners (including Independent Commissioners) and members of Board of Directors of the Company in a deed which is drawn up before a Public Notary, and to take all actions required with respect to the foregoing without any exception.

Fifth Agenda:

Abstain votes: 12.600, "Against/Not agree" votes: 3.694.087, hence the number of affirmative votes 9.071.252.119 votes or 99,96%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the AGM, therefore the AGM resolution is as follows:

Authorize and give power to (a) the Board of Commissioners to determine the salary and allowance for the Board of Directors along with distribution of duties and powers of the members of Board of Directors, and (b) the President Commissioner to determine the salary and allowances for the members of the Board of Commissioners (including member of Independent Commissioners) and to distribute the duties and powers of each member of the Board of Commissioners (including Independent Commissioner member).

AGM was followed with the EGM.

With reference to the Company Shareholders' Register as of May 19, 2020 up to 4.00 pm, the Shareholders present and/or represented at AGM the meeting with amount of 9.075.426.521 shares, representing 77,47% of 11.714.114.001 shares, which are the entire issued shares of the Company (after deducting with buy back shares), with the following agenda:

a. To approve rights issue/Capital Increase With Pre-emptive Rights in accordance with Indonesia Financial Services Authority Rule (POJK) Number 32/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 and POJK No. 14/POJK.04/2019 dated 29 April 2019.
b. To approve the Company's shares buyback in accordance with Indonesia Financial Services Authority Rule Number 30/POJK.04/2017 dated 21 June 2017 Re: Shares Buyback by Public Company and its utilization.

For EGM's Agenda, the Company has given opportunity to the shareholders and its proxy/representative to raise question, but no shareholder asked question.

The adoption of resolution EGM shall be adopted amicably to reach a mutual consensus, in the event the consensus is not reached, the resolution shall be adopted by way of voting.

The EGM has resolved the following resolutions as set forth in Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, No.93 dated June 18, 2020, made before the Public Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., MKn., which is summarized as follows:

First Agenda:

Abstain votes: 2.500, "Against/Not agree" votes: 240.000, hence the number of affirmative votes 9.075.186.521 votes or 99,99%, or more than 1/2 (one-half) of the total votes lawfully casts at the EGM, therefore the EGM resolution is as follows:

*Approve Company's plan to perform rights issue/Capital Increase With Pre-emptive Rights by issuing new Series A shares in a maximum amount of 30% (thirty percent) of the total number of shares that have been issued and fully paid by the Company or 3.517.972.560 (three billion, five hundred seventeen million, nine hundred seventy-two thousand, five hundred sixty) Series A shares ("New Shares") with a nominal value per share of Rp200, - in accordance with Financial Services Authority Regulation ("OJK") No. 32/POJK.04/2015 as amended by OJK Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendment to OJK Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Increasing Capital of a Public Company By Giving Pre-emptive Rights, including: